



Website:

ojs.unwaha.ac.id/index.php/joems/

***Correspondence:**

muhammad.yafi@mhs.unj.ac.id

DOI:

10.32764/joems.v9i4.1802

Citation:

Hafiz, M. Y. A. (2026). Antara Aspirasi Lokal dan Standar Nasional: Menakar Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Kurikulum Merdeka dalam Otonomi Daerah. *JoEMS: Journal of Education and Management Studies*, 9(4), 343-357.

Article Process

Received:

June 6, 2026

Revised:

August 4, 2026

Accepted:

August 6, 2026

Office:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Jalan Garuda 9 Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

E-ISSN: 26545209

Antara Aspirasi Lokal dan Standar Nasional: Menakar Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Kurikulum Merdeka dalam Otonomi Daerah

Muhammad Yafi Abdul Hafiz

Affiliation:

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Purpose: This research examines the management effectiveness of the Merdeka Curriculum under regional autonomy, gauging the synergy between fulfilling local aspirations and achieving national standards to equitably optimize national education quality.

Methodology/approach: A qualitative literature review approach was employed. Systematic searches of scientific literature and official government documents from 2017 to 2025 were conducted, followed by in-depth evaluation using qualitative content analysis and thematic synthesis.

Findings: Implementation shows significant tension between national flexibility and local contextual adaptation. While regional autonomy provides strategic roles, its success heavily depends on local governance quality. Furthermore, on-the-ground effectiveness is hindered by severe disparities in teacher readiness for innovative practices, and educational inequality in frontier regions remains a critical challenge.

Practical implications: Local governments must create responsive policies and provide equitable capacity-building programs for educators to minimize regional disparities in curriculum implementation.

Originality/value: This review specifically maps the dilemma between national standard centralization and local aspiration decentralization regarding the ongoing Merdeka Curriculum implementation in Indonesia.

Keywords: Local Aspirations; Merdeka Curriculum; Regional Autonomy; Educational Management.

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan Kurikulum Merdeka di era otonomi daerah, serta menakar sinergi antara pemenuhan aspirasi lokal dan pencapaian standar nasional sebagai faktor kunci dalam optimalisasi mutu pendidikan nasional secara merata.



Metode/pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelusuran sistematis dilakukan terhadap berbagai literatur ilmiah dan dokumen resmi pemerintah pada periode 2017-2025, yang kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teknik analisis konten kualitatif dan sintesis tematik.

Hasil: Terdapat empat temuan utama. Pertama, muncul ketegangan antara fleksibilitas kurikulum nasional dan tuntutan adaptasi lokal. Kedua, otonomi daerah berperan strategis namun sangat bergantung pada kualitas tata kelola. Ketiga, efektivitas dipengaruhi oleh ketimpangan kesiapan guru dalam memahami praktik inovatif. Keempat, kesenjangan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih menjadi tantangan krusial.

Implikasi praktik: Hasil penelitian ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih responsif menyusun kebijakan lokal, serta perlunya peningkatan kapasitas pendidik yang lebih merata untuk meminimalisasi ketimpangan kualitas implementasi kurikulum antarwilayah.

Orisinalitas/kebaharuan: Kajian ini memberikan sintesis literatur terkini yang secara spesifik memetakan dilema pengelolaan pendidikan antara sentralisasi standar dan desentralisasi aspirasi lokal dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Indonesia.

Kata kunci: Aspirasi Lokal; Kurikulum Merdeka; Otonomi Daerah; Pengelolaan Pendidikan.

PENDAHULUAN

Secara teoretis, pelaksanaan pendidikan di Indonesia berpijak pada konsep desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Teori desentralisasi pendidikan mengamanatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pengelolaan dan kebijakan pendidikan dapat lebih responsif, adaptif, serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dalam tataran praktis, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di berbagai daerah Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama akibat perbedaan kapasitas sumber daya dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan secara mandiri. Kurang optimalnya penerapan kurikulum ini mencerminkan disparitas antardaerah, baik dari segi infrastruktur, kompetensi tenaga pendidik, maupun dukungan kebijakan lokal. Hilmin dkk. (2022) menyebutkan hambatan terbesar implementasi Kurikulum Merdeka di daerah terletak pada minimnya pemahaman dan kesiapan dalam penyusunan program serta pengelolaan perangkat ajar. Mardiana & Emmiyati (2024) juga menemukan ketidaksiapan manajemen sekolah dan stakeholder pendidikan sebagai kendala utama optimalisasi program. Afista dkk. (2020) menegaskan pentingnya kesiapan guru, mengingat banyak guru daerah belum memperoleh pelatihan memadai mengenai paradigma pembelajaran baru. Selain itu, Agayanu (2020) mengungkapkan bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya didukung pemerataan mutu pendidikan, sedangkan Fadil Miftahudin dkk. (2025)

menyoroti variasi penerimaan kebijakan akibat minimnya komunikasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, perbedaan kesiapan dan kapabilitas pemerintah daerah menjadi faktor sentral belum optimalnya pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara merata.

Ketimpangan implementasi Kurikulum Merdeka di daerah semakin diperburuk oleh faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan pendidikan. Khasib dkk. (2024) menyatakan evaluasi efektivitas kurikulum menunjukkan hasil beragam karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan rendahnya tingkat inovasi sekolah. Faktor eksternal seperti ketidaksetaraan infrastruktur pendidikan juga menjadi hambatan utama (Lusyany dkk., 2024). Gumilar dkk. (2023) menambahkan bahwa perubahan kurikulum sering tidak disertai pendampingan menyeluruh bagi pelaksana kebijakan daerah, sehingga menimbulkan resistensi dan pemahaman keliru. Panginan & Susianti (2022) mengemukakan bahwa meskipun hasil belajar peserta didik meningkat di beberapa daerah, capaian tersebut tidak merata karena perbedaan kesiapan daerah dalam mengadopsi kurikulum. Ridwan & Sumirat (2021) menunjukkan kebijakan desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya efektif memberdayakan daerah dengan sumber daya dan kebijakan lokal yang terbatas. Perbedaan sumber daya, kebijakan sekolah, dan keterlibatan pemangku kepentingan ini menjadikan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di bawah kerangka otonomi daerah semakin kompleks dan menuntut perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang optimal masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah, sehingga pemenuhan standar nasional berjalan tidak seragam. Keragaman kesiapan ini tercermin dari tidak meratanya sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur di tingkat lokal. Afista dkk. (2020) serta Mardiana & Emmiyati (2024) menemukan bahwa keberhasilan adaptasi kurikulum sangat dipengaruhi kesiapan guru, yang di beberapa wilayah masih sebatas pemenuhan administratif tanpa inovasi pedagogis substantif. Hambatan ini diperparah oleh minimnya kolaborasi lintas sektor dan komunikasi efektif (Fadil Miftahudin dkk., 2025; Hilmin dkk., 2022). Akibatnya, respons daerah terhadap kebijakan nasional menjadi sangat bervariasi. Jika tidak ditangani secara sistematis, realita ketidaksiapan dan perbedaan kapasitas pengelolaan ini berpotensi memperlebar jurang pemerataan mutu pendidikan antardaerah di Indonesia.

Peneliti telah menelusuri beragam studi terkait dinamika implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks otonomi daerah, khususnya tantangan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan secara otonom. Hasil penelusuran menunjukkan tema ini banyak menjadi perhatian akademisi dan praktisi, terutama dalam menganalisis ketidakseimbangan pelaksanaan kurikulum antara daerah mapan dan daerah dengan keterbatasan

infrastruktur, sumber daya manusia, serta koordinasi birokrasi. Ridwan & Sumirat (2021) mencatat kebijakan desentralisasi pendidikan memberi ruang inovasi daerah, tetapi sering tidak diikuti peningkatan kompetensi dan fasilitas memadai, sehingga berdampak pada optimalisasi adopsi kurikulum. Khasib dkk. (2024) dan Gumilar dkk. (2023) juga menyoroti efektivitas Kurikulum Merdeka yang belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam penyesuaian pola pembelajaran yang mensyaratkan kemandirian daerah. Zulaiha dkk. (2022) menambahkan bahwa guru masih mengalami kendala adaptasi kebijakan, diperparah disparitas antar daerah. Panginan & Susianti (2022) menunjukkan hasil belajar peserta didik di bawah Kurikulum Merdeka bervariasi, tergantung kesiapan institusi pendidikan masing-masing daerah. Lusany dkk. (2024) mengaitkan optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Lebih jauh, hubungan erat antara otonomi daerah, kesiapan sumber daya, dan keberhasilan Kurikulum Merdeka juga terlihat pada analisis kebijakan Suti (2011) dan Tanggu Daga dkk. (2018) yang menekankan pentingnya strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis lokal serta penguatan sinergi pemerintah daerah dengan instansi pusat. Dari berbagai tinjauan literatur tersebut, ditemukan *research gap* yang mendasar: mayoritas penelitian terdahulu memiliki fokus yang terpisah-pisah. Beberapa studi hanya menyoroti kebijakan dan tata kelola administratif (Hilmin dkk., 2022), sementara lainnya lebih berfokus parsial pada implementasi di tingkat satuan pendidikan, kinerja guru, atau capaian hasil belajar peserta didik. Secara umum, literatur yang ada sepakat bahwa disparitas kompetensi menjadi hambatan, namun belum ada kajian komprehensif yang mengerucut pada formulasi kebijakan penyesuaian kurikulum yang menjembatani standar nasional dengan kebutuhan spesifik serta heterogenitas kapasitas daerah.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara menyeluruh efektivitas pengelolaan Kurikulum Merdeka di era otonomi daerah, serta menakar sinergi antara aspirasi lokal dan standar nasional sebagai faktor kunci optimalisasi pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistiknya yang tidak sekadar mengidentifikasi hambatan administratif, melainkan menyajikan rancangan sinergitas antara wacana desentralisasi (otonomi daerah) dengan target pencapaian standar pendidikan nasional. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya mendukung sistem pendidikan yang adaptif dan berdaya saing di tengah problem ketimpangan mutu. Dengan menelaah relasi antara otonomi daerah dan pengelolaan kurikulum berbasis karakteristik lokal, hasil penelitian diharapkan berkontribusi bagi pemerintah daerah dan pengambil kebijakan nasional dalam merumuskan intervensi maupun kebijakan pendidikan yang inklusif dan responsif. Urgensi penelitian ini semakin kuat di tengah wacana desentralisasi

yang menimbulkan fragmentasi dan ketidakseragaman kualitas pendidikan, sehingga dibutuhkan mekanisme yang mengakomodasi aspirasi lokal sekaligus menjaga pencapaian standar nasional. Identifikasi praktik terbaik dan hambatan lokal diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang preskriptif, relevan, dan berbasis bukti, sehingga penelitian ini menjadi rujukan dalam transformasi kebijakan pendidikan nasional yang sejalan dengan semangat otonomi daerah sekaligus mengatasi persoalan ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*), sebuah rancangan yang dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam interaksi antara aspirasi lokal dan standar nasional dalam pengelolaan pendidikan Kurikulum Merdeka di bawah kerangka otonomi daerah. Sebagai penelitian non-lapangan, pelaksanaannya difokuskan pada penelusuran literatur secara sistematis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan sumber data berupa literatur ilmiah dan dokumen resmi yang relevan, seperti artikel jurnal, prosiding, buku, laporan penelitian, dan kebijakan pemerintah. Korpus kajian dalam penelitian ini menggunakan basis data publikasi ilmiah terkait tata kelola kurikulum dan otonomi daerah yang diterbitkan pada periode 2017-2025. Strategi seleksi literatur diterapkan dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), di mana sumber data dipilih secara spesifik menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang relevan dengan fokus topik. Teknik pengumpulan data melibatkan penelusuran kata kunci spesifik (“Kurikulum Merdeka”, “Otonomi Daerah Pendidikan”, “Aspirasi Lokal Pendidikan”, “Standar Nasional Pendidikan”, dll.) pada basis data ilmiah terkemuka, diikuti dengan seleksi ketat dan ekstraksi informasi krusial dari setiap sumber. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten kualitatif dan sintesis tematik, yang mana temuan dari literatur dikodifikasi, dikategorikan, dibandingkan, dan disintesis untuk membangun argumen komprehensif guna menakar efektivitas pengelolaan pendidikan yang dimaksud. Dalam pelaksanaannya, instrumen penelitian utama adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*), yang berperan sentral sebagai pengumpul, penyaring, dan penganalisis data tekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Bagian ini diawali dengan pemaparan statistik deskriptif untuk menyajikan gambaran umum dan karakteristik dari data literatur yang digunakan. Berdasarkan penelusuran sistematis, terkumpul 20 literatur utama yang terbit antara tahun 2011 hingga 2025. Mayoritas publikasi (80%) berada pada rentang lima tahun terakhir (2020-2025), yang mengindikasikan tingginya kebaruan data. Secara tematik, literatur didominasi oleh kajian mengenai kesiapan

instrumen pendidikan, ketimpangan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta dinamika kebijakan otonomi pendidikan. Hasil ekstraksi data direpresentasikan dalam bentuk tabel komprehensif yang merangkum informasi esensial, meliputi nama penulis, tahun publikasi, serta ringkasan substansial dari temuan utama. Penyajian karakteristik data ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif yang akan menjadi landasan bagi analisis dan interpretasi lebih lanjut.

Tabel 1. Hasil studi literatur terkait kurikulum merdeka dalam konteks otonomi daerah

Nama Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
Afista, Y., R. A. P., & Huda, S. A. A.	2020	Penelitian ini mengidentifikasi bahwa guru PAI di MTsN 9 Madiun menunjukkan kesiapan tinggi dalam penyusunan RPP ringkas, namun kesiapan rendah dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survei karakter dari aspek kognitif, fisik, dan psikologis. Sarana penunjang pembelajaran di lokasi studi telah memenuhi standar minimum.
Agayanu	2020	Artikel ini membahas peran otonomi daerah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, menekankan bahwa desentralisasi dapat menjadi faktor penting dalam adaptasi kebijakan pendidikan sesuai karakteristik lokal.
Ayudhia Nur Luthfia, Nabila Putri Wahiddiyah, Desy Safitri, & Sujarwo	2023	Analisis ini memaparkan berbagai problematika pendidikan yang dihadapi di wilayah 3T Indonesia, termasuk isu keterbatasan infrastruktur, kualitas tenaga pengajar, aksesibilitas pendidikan, serta relevansi kurikulum dengan konteks wilayah setempat.
Azkiyah, S. R., Aryola, G., & Lukitoaji, B. D.	2025	Studi ini menganalisis kesenjangan pendidikan di daerah terpencil dan mengusulkan berbagai solusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih merata, meliputi peningkatan akses, kualitas guru, dan fasilitas.
Gumilar, G., Perdana, D., Rosid, S., Sumardjoko, B., Ghufiron, A., & Dasar, M. P.	2023	Studi ini mengkaji urgensi penggantian Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka, menyoroti kebutuhan akan kurikulum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik.

Hilmin, Noviani, D., & Nafisah, A.	2022	Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam proses penerapan Kurikulum Merdeka, mengidentifikasi langkah-langkah adaptasi dan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Jauhari, S. S.	2023	Data statistik menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan yang signifikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan di Indonesia, di mana penduduk di pedesaan masih didominasi oleh lulusan SD.
Khasib, M., Murtadlo, A., Oktafiani, D. A., Faizah, H., Kh, U., & Abdurrahman, W.	2024	Evaluasi ini menilai efektivitas Kurikulum Merdeka sebagai upaya menuju implementasi yang optimal, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan kurikulum tersebut.
Laili, N., & Pradikto, S.	2025	Artikel ini membahas reformasi kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan akademik dengan pengembangan keterampilan hidup, menekankan relevansi kurikulum dengan tuntutan kontemporer.
Lusyany, D., et al.	2024	Studi kasus ini mengevaluasi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, dengan fokus pada analisis kondisi infrastruktur di Kepulauan Mentawai.
Mardiana, & Emmiyati.	2024	Penelitian ini mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka dalam praktik pembelajaran, mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan pembaruan dan perbaikan untuk mencapai tujuan kurikulum yang optimal.
Marwa, N. W. S., Usman, H., & Qodriani, B.	2023	Studi ini menginvestigasi persepsi guru sekolah dasar terhadap mata pelajaran IPAS dalam Kurikulum Merdeka, menyoroti tantangan dan penerimaan mereka terhadap materi dan pendekatan pengajaran yang baru.
Mubin, F., et al.	2023	Artikel ini menekankan urgensi otonomi pendidikan sebagai upaya krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan argumen bahwa

		desentralisasi dapat mendorong inovasi dan relevansi kurikulum.
Pingge, H. D.	2017	Studi ini mengkaji konsep dan implementasi kearifan lokal dalam lingkungan sekolah, menunjukkan bagaimana integrasi elemen lokal dapat memperkaya proses pembelajaran dan relevansi kurikulum.
Ridwan, I., & Sumirat, I. R.	2021	Artikel ini menganalisis kebijakan desentralisasi pendidikan pada era otonomi daerah, serta implikasinya terhadap pengelolaan dan pengembangan sektor pendidikan di tingkat lokal.
Safarah, A. A., & Wibowo, U. B.	2018	Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program zonasi di sekolah dasar sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sulaiman, Sumiyati, Putri Julita, & Sakila Putri	2025	Penelitian ini menyajikan perbandingan efektivitas antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Sejarah di SMAN 2 Dompu, menganalisis perbedaan capaian belajar siswa dan pengalaman mengajar guru.
Suti, M.	2011	Studi ini menganalisis berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk peningkatan mutu pendidikan dalam konteks era otonomi pendidikan.
Tanggu Daga, A., et al.	2018	Tinjauan ini membahas evolusi kebijakan pengembangan kurikulum di sekolah dasar, mulai dari Kurikulum 2006 hingga kebijakan Merdeka Belajar.
Zulaiha, S., Meisin, M., & Meldina, T.	2022	Penelitian ini mengidentifikasi berbagai problematika yang dihadapi guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar, termasuk tantangan adaptasi metode pengajaran dan pemahaman filosofi kurikulum.

Pembahasan

Penelitian ini telah menguraikan secara menyeluruh hasil-hasil terkait rumusan masalah yang diajukan mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks otonomi daerah dan hubungan antara aspirasi lokal dengan standar nasional pendidikan. Dalam pembahasan ini, peneliti memfokuskan analisis pada isu-isu kunci yang telah teridentifikasi melalui pengumpulan dan analisis data, khususnya mengenai bagaimana Kurikulum Merdeka mengakomodasi

kebutuhan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip nasional pendidikan serta pengaruh otonomi daerah terhadap proses pengelolaan dan implementasi kebijakan tersebut di tingkat lokal. Temuan utama penelitian ini meliputi dinamika implementasi Kurikulum Merdeka yang menunjukkan adanya pergeseran antara fleksibilitas pada level nasional dengan respons terhadap karakteristik lokal, peranan strategis otonomi daerah dalam penguatan tata kelola pendidikan, evaluasi efektivitas pengelolaan yang dipengaruhi oleh tantangan dan kesiapan pelaksana di lapangan, serta munculnya kesenjangan dan isu pemerataan dalam menyeimbangkan aspirasi lokal dengan standar nasional yang menjadi perhatian esensial dalam pengelolaan pendidikan di bawah otonomi daerah.

Dinamika Implementasi Kurikulum Merdeka: Antara Fleksibilitas Nasional dan Konteks Lokal

Dinamika implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya ketegangan antara fleksibilitas yang diusung secara nasional dan tuntutan adaptasi terhadap konteks lokal pendidikan. Meskipun Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi sekolah menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi peserta didik, praktik di lapangan tidak selalu berjalan linier. Sebagian sekolah berhasil mengintegrasikan muatan dan kearifan lokal secara kreatif, namun banyak juga yang terkendala keterbatasan sumber daya, resistensi pelaksana, serta ketidakselarasan antara standar nasional dan kebutuhan daerah. Kondisi ini menciptakan dinamika kompleks, di mana sekolah harus menegosiasikan ekspektasi kebijakan makro dengan realitas mikro.

Dalam menganalisis dinamika ini, kajian literatur menunjukkan benang merah yang saling melengkapi: fleksibilitas kebijakan nasional hanya akan bermakna jika diiringi dengan kapasitas adaptasi lokal. Permatasari (2020) mengidentifikasi adanya *gap* inheren antara desain makro kebijakan dan realitas mikro pelaksanaan. *Gap* ini, yang secara teoretis dipandang sebagai kelemahan, justru berpotensi membuka peluang bagi penyesuaian kebijakan sesuai karakteristik daerah. Jika kearifan lokal diintegrasikan, sebagaimana diargumentasikan oleh Pingge (2017) dan dikonfirmasi oleh tuntutan penyelarasan keterampilan hidup oleh Laili & Laili & Pradikto (2025). Meskipun demikian, pandangan mengenai manfaat desentralisasi ini kerap bertentangan dengan realitas empiris yang dikemukakan oleh Sulaiman dkk. (2025) dan Gumilar dkk. (2023), yang membuktikan bahwa pergeseran ke kurikulum adaptif seringkali menghadapi berbagai kendala terkait kesiapan pelaksana lokal. Oleh sebab itu, peneliti berargumen bahwa dinamika implementasi Kurikulum Merdeka bukanlah sekadar proses *top-down* yang fleksibel, melainkan sebuah proses dialektika berkelanjutan yang menuntut negosiasi terus-menerus antara visi ideal standar nasional dan realitas pragmatis keterbatasan di lapangan.

Peran Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Kurikulum Merdeka

Peran otonomi daerah dalam pengelolaan Kurikulum Merdeka merupakan salah satu temuan signifikan dalam penelitian ini. Kebijakan ini memfasilitasi transfer kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengadaptasi, mengelola, dan mengimplementasikan kurikulum sesuai karakteristik lokal. Dengan kewenangan ini, daerah memiliki kendali lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pengelolaan berbasis otonomi daerah melibatkan aktor lokal seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk merancang pembelajaran yang kontekstual dan inovatif, memaksimalkan potensi daerah. Namun, efektivitasnya bergantung pada kualitas tata kelola pemerintah daerah, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dari berbagai literatur tersebut, peneliti menyintesis bahwa otonomi daerah menunjukkan adanya dua konsekuensi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, temuan Agayanu (2020) dan kerangka *Governance Theory* Ridwan & Sumirat (2021) sepakat bahwa desentralisasi memperkuat partisipasi lokal; sebuah klaim yang saling melengkapi dengan bukti empiris Mubin dkk. (2023) dan Hilmin dkk. (2022) terkait terdorongnya inovasi kurikulum. Bahkan di wilayah tertinggal sekalipun, pelimpahan wewenang terbukti secara sporadis mampu meningkatkan layanan pendidikan Lusany dkk. (2024). Namun, peneliti berargumen bahwa pandangan optimis ini kerap mengabaikan sisi lain dari otonomi: pelimpahan wewenang yang tidak disertai pemerataan kapasitas fiskal dan manajerial justru berpotensi mempertahankan kesenjangan yang sudah ada. Dengan demikian, otonomi daerah bukan semata-mata solusi mutlak bagi implementasi kurikulum, melainkan sebuah instrumen bersyarat; ia baru akan menjadi prasyarat akselerasi mutu jika pemerintah daerah berhasil membangun ekosistem tata kelola yang transparan, kolaboratif, dan akuntabel.

Efektivitas Pengelolaan: Tantangan dan Kesiapan Pelaksana di Lapangan

Efektivitas pengelolaan pada tataran implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan merefleksikan suatu dinamika kompleks yang berakar pada tantangan-tantangan serta kesiapan pelaksana, khususnya para pendidik dan perangkat sekolah. Temuan menunjukkan adanya disparitas kesiapan; banyak guru mampu menyesuaikan administrasi seperti RPP ringkas, namun kesulitan dalam praktik AKM, survei karakter, serta pemahaman filosofi kurikulum. Hambatan ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikososial, terutama kesiapan mental dan sikap adaptif yang belum merata. Selain itu, sarana prasarana sekolah meski memenuhi standar minimum, belum sepenuhnya mendukung pembelajaran kolaboratif, inovatif, dan personal.

Mensintesis beragam tantangan teknis tersebut, peneliti menemukan adanya dikotomi yang tegas antara 'kepatuhan administratif' dan 'transformasi

pedagogis'. Penelitian Afista dkk. (2020) dan Zulaiha dkk. (2022) secara gamblang saling melengkapi dalam memotret realita bahwa kesiapan guru saat ini masih terperangkap pada rutinitas administratif (seperti penyusunan RPP), namun kerap gagal menembus pemahaman filosofis esensial. Bukti- bukti empiris ini belum sepenuhnya sejalan dengan Teori Perubahan Organisasi (Lase dkk., 2025) dan Teori Kapasitas (Supriyadi dkk., 2023), yang mengisyaratkan bahwa tanpa perubahan cara kerja, adaptasi sistemik mustahil terjadi. Temuan Khasib dkk. (2024) dan Marwa dkk. (2023) semakin mempertegas ketimpangan kapasitas ini. Dari lanskap literatur yang ada, peneliti berargumen kuat bahwa keberhasilan implementasi kurikulum saat ini tidak lagi sekadar menuntut distribusi panduan dan sarana fisik, melainkan sangat membutuhkan intervensi psikososial dan pendampingan transformatif agar para pelaksana mampu melampaui fase sekadar 'kesiapan di atas kertas'.

Kesenjangan dan Pemerataan dalam Konteks Aspirasi Lokal dan Standar Nasional

Kesenjangan dan pemerataan dalam konteks aspirasi lokal dan standar nasional merupakan salah satu temuan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Fenomena ini tampak jelas, terutama di wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), di mana tantangan terbesar yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, serta adanya jurang antara kebijakan nasional dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Ketimpangan pembangunan pendidikan menyebabkan akses dan kualitas pembelajaran di daerah pinggiran jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Aspirasi lokal yang unik kerap tidak terakomodasi secara memadai dalam kebijakan nasional yang bersifat seragam, sehingga berdampak pada rendahnya relevansi dan efektivitas pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat daerah. Praktik implementasi kurikulum pun masih didominasi oleh kepatuhan terhadap standar nasional, sehingga ruang adaptasi terhadap kebutuhan lokal menjadi sangat terbatas.

Menganalisis ketimpangan ini, literatur memperlihatkan kontradiksi yang tajam antara cita-cita pemerataan dan kenyataan struktural di lapangan. Teori Keadilan Sosial (Rahmadewi dkk., 2025) yang menuntut akses pendidikan non diskriminatif, pada praktiknya kerap dimentahkan oleh determinasi Teori Pembangunan Tidak Merata (Afandi & Erdayani, 2022). Kajian Ayudhia Nur Luthfia dkk. (2023) dan Jauhari (2023) secara konsisten mengonfirmasi bahwa wilayah 3T dan pedesaan secara struktural tertinggal dalam merespons desentralisasi, mematahkan asumsi bahwa otonomi otomatis membawa pemerataan. Menariknya, analisis literatur juga menyingkap bahwa intervensi sistemik seperti program zonasi Safarah & Wibowo (2018) dan pemenuhan sarana fisik Azkiyah dkk. (2025) seringkali hanya menyentuh gejala permukaan tanpa mengurai akar masalah krusial, yakni krisis kualitas tenaga pengajar di

daerah pinggiran. Dari sintesis komprehensif ini, peneliti berargumen bahwa penerapan standar nasional yang kaku di tengah ketimpangan infrastruktur ekstrem justru berpotensi mengurangi relevansi kebijakan di daerah dengan kapasitas terbatas. Oleh karena itu, sinergi nyata antara aspirasi lokal dan pencapaian nasional hanya dapat terwujud apabila pusat bersedia merancang metrik evaluasi yang terdiferensiasi (bertingkat) sesuai dengan indeks kesiapan riil masing-masing daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pengelolaan Kurikulum Merdeka dalam konteks otonomi daerah, dengan menyoroti hubungan antara aspirasi lokal dan pemenuhan standar nasional pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan Kurikulum Merdeka di era otonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas tata kelola lokal dan kesiapan pendidik dalam menjembatani standar nasional dengan aspirasi daerah. Ketimpangan sumber daya, terutama di wilayah 3T, masih menjadi hambatan utama yang memicu ketegangan antara fleksibilitas kebijakan dan realita implementasi di lapangan. Secara teoretis, kajian ini mengonfirmasi bahwa desentralisasi pendidikan mutlak membutuhkan tata kelola yang responsif. Secara praktis, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif dalam pemerataan infrastruktur dan penguatan kompetensi pendidik untuk meminimalisasi disparitas.

Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal dalam mengelola Kurikulum Merdeka secara efektif, dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi lokal tanpa mengabaikan standar nasional. Selain itu, peningkatan kompetensi guru dan perangkat sekolah menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkecil disparitas mutu pendidikan antar daerah. Secara teoretis, temuan ini memperkaya khazanah kajian kebijakan pendidikan berbasis otonomi daerah di Indonesia dengan menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan menuntut tata kelola yang kuat dan kebijakan yang responsif terhadap keragaman lokal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur tanpa pengumpulan data primer, sehingga belum menangkap secara utuh dinamika dan praktik implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris seperti observasi langsung, wawancara mendalam, atau studi kasus di berbagai daerah guna menangkap keragaman praktik dan aspirasi lokal secara lebih komprehensif. Pendekatan tersebut akan membantu memperkaya pemahaman tentang efektivitas pengelolaan Kurikulum Merdeka serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dalam

menyeimbangkan aspirasi lokal dengan standar nasional pendidikan di Indonesia.

355

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S., & Erdayani, R. (2022). Pengantar Teori Pembangunan. <https://osf.io/preprints/qf5hr/>
- Afista, Y., R, A. P., & Huda, S. A. A. (2020). Analisis Kesiapan Guru PAI DALAM Menyongsong Kebijakan Merdeka Belajar: Studi Kasus di MTsN 9 Madiun. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 3(6), 53–60. <https://ojs.unwaha.ac.id/index.php/joems/article/view/338>
- Agayanu. (2020). Otonomi Daerah dan Mutu Pendidikan – PB PGRI. <https://pgri.or.id/2020/02/23/otonomi-daerah-dan-mutu-pendidikan/>
- Astungkoro, R. (2022). Kemendikbudristek Kolaborasi dengan Pemda dalam Implementasi Kurikulum Merdeka | Republika Online. <https://news.republika.co.id/berita/rfq7kt380/kemendikbudristek-kolaborasi-dengan-pemda-dalam-implementasi-kurikulum-merdeka?>
- Ayudhia Nur Luthfia, Nabila Putri Wahiddiyah, Desy Safitri, & Sujarwo Sujarwo. (2023). Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T. *Guruku: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 36–46. <https://doi.org/10.59061/guruku.v1i4.491>
- Azkiyah, S. R., Aryola, G., & Lukitoaji, B. D. (2025). Kesenjangan Pendidikan di Daerah Terpencil: Solusi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Merata. *EDUCREATIVA: Jurnal Seputar Isu dan Inovasi Pendidikan*, 1(1), 121–129. <https://journal.mahsy-educreativa.com/index.php/educreativa/article/view/18/18>
- Fadil Miftahudin, M., Tazkiyatun Nufus, N., Hilaliyah, T., Raya Palka Km, J., & Serang Provinsi Banten, K. (2025). Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Praktik Pembelajaran Sekolah di Indonesia. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 3(1), 159–168. <https://doi.org/10.61132/SADEWA.V3I1.1473>
- Gumilar, G., Perdana, D., Rosid, S., Sumardjoko, B., Ghufro, A., & Dasar, M. P. (2023). Urgensi Penggantian Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 5(2), 148–155. <https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/jurnalpendidikandasar/article/view/1825>
- Hilmin, Noviani, D., & Nafisah, A. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 148–162.
- Jauhari, S. S. (2023). Ketimpangan Pendidikan Desa dan Kota Masih Tinggi, Penduduk Desa Didominasi Tamatan SD - GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/ketimpangan-pendidikan-desadan-kota-masih-tinggi-penduduk-desadidominasi-tamatan-sd-raozg>
- Khasib, M., Murtadlo, A., Oktafiani, D. A., Faizah, H., Kh, U., Abdurrahman, W.,

- & Pekalongan, I. (2024). Evaluasi Efektivitas Kurikulum Merdeka Sebagai Langkah Kritis Menuju Implementasi yang Optimal. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 6(5), 5564–5571. <https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V6I5.7052>
- Laili, N., & Pradikto, S. (2025). Reformasi Kurikulum Pendidikan: Menyelaraskan Kebutuhan Akademik dan Keterampilan Hidup. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(01 Februari), 878–887. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/131>
- Lase, D., Absah, Y., Lumbanraja, P., Giawa, Y., & Gulo, Y. (2025). Teori Budaya Organisasi: Konsep, Model, dan Implikasi untuk Manajemen Organisasi. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 21–45. <https://doi.org/10.62138/TUHENORI.V3I1.128>
- Lusyany, D., Aditya, D. R., Amanda, S. A., najwa, amanda fitria, Ramadhinov, R., Tarananda, G. R., Herlambang, Y. P., Istiqomah, S. Y., & Fanrisa, R. A. (2024). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Tertinggal: Studi Kasus Kondisi Infrastruktur di Kepulauan Mentawai. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(6). <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/226>
- Mardiana, & Emmiyati. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran: Evaluasi dan Pembaruan. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 10(2), 121–127. <https://doi.org/10.26740/JRPD.V10N2.P121-127>
- Marwa, N. W. S., Usman, H., & Qodriani, B. (2023). Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Mata Pelajaran IPAS Pada Kurikulum Merdeka. *Metodik Didaktik*, 18(2), 54–64. <https://doi.org/10.17509/MD.V18I2.53304>
- Mubin, F., Dian Kharisma Ivada, P., Aziz, A., Kunci, K., Otonomi Pendidikan, A., & Pendidikan, M. (2023). Urgensi Otonomi Pendidikan dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 5(01), 71–79. <https://doi.org/10.36671/ANDRAGOGI.V5I01.454>
- Panginan, V. R., & Susianti, S. (2022). Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Perbandingan Penerapan Kurikulum 2013. *Jurnal PGSD Universitas Lamappapoleonro*, 1(1), 9–16. <https://doi.org/10.57093/JPGSDUNIPOL.V1I1.7>
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Pingge, H. D. (2017). Kearifan Lokal Dan Penerapannya Di Sekolah Core View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Jurnal STKIP Weetebula. *Jurnal Edukasi Sumba*, 01(02), 128–135. <https://core.ac.uk/download/pdf/287372562.pdf>
- Rahmadewi, R., Harahap, N. T. H., & Hidayatulloh, R. (2025). Filsafat Hukum dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Pendidikan*,

Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 3(01).
<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>

-
- 357** Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/11611>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 21(2), 206–213.
<https://doi.org/10.24252/LP.2018V21N2I6>
- Sulaiman, Sumiyati, Putri Julita, & Sakila Putri. (2025). Perbandingan Efektivitas Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Sejarah di SMAN 2 Dompu. *JURNAL PENDIDIKAN & PENGAJARAN (JUPE2)*, 3(1), 62–78. <https://doi.org/10.54832/jupe2.v3i1.509>
- Supriyadi, S., Febriyani, S. A., & Anisa, S. N. (2023). Prinsip Teori Organisasi Klasik Menurut Henry Fayol. *Mantra (Jurnal Manajemen Strategis)*, 1(1), 33–42.
<https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/mantra/article/view/93>
- Suti, M. (2011). Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan. *Jurnal MEDTEK*, 3(2).
- Tanggu Daga, A., Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, P., & Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Weetebula, S. (2018). Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 hingga Kebijakan Merdeka Belajar).
- Zulaiha, S., Meisin, M., & Meldina, T. (2022). Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 9(2), 163–177.
<https://doi.org/10.24042/TERAMPIL.V9I2.13974>.